

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUYATMI**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
3. NHK : **754456**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **352.000.000**

1. Tanah Seluas 950 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
121.600.000
2. Tanah Seluas 1800 m2 di KARANGANYAR, WARISAN Rp.
230.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **337.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 170.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 135.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
24.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO AT/NC110 D CW Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **50.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **36.682.282****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **775.682.282****III. HUTANG** Rp. **----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **775.682.282**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 September 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.